

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu permasalahan yang jarang menjadi topik utama dalam pelaksanaan pekerjaan terutama dalam bidang konstruksi. Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Sebagian besar dari kasus-kasus kecelakaan kerja terjadi pada kelompok usia produktif. Kematian merupakan akibat dari kecelakaan kerja yang tidak dapat diukur nilainya secara ekonomis. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat seumur hidup, disamping berdampak pada kerugian non-materil, juga menimbulkan kerugian materil yang sangat besar, bahkan lebih besar bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh penderita penyakit-penyakit serius seperti penyakit jantung dan kanker .

Untuk memperkecil resiko kecelakaan kerja, sejak awal tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang keselamatan kerja khusus untuk sektor konstruksi, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980. Peraturan mengenai keselamatan kerja untuk konstruksi tersebut, terakhir diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Hal yang sangat disayangkan adalah penerapan peraturan tersebut ketika pelaksanaan pembangunan konstruksi dilakukan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan masalah keselamatan kerja dan rendahnya tingkat penegakan hukum oleh pemerintah, hal tersebut mengakibatkan penerapan peraturan keselamatan kerja yang masih jauh dari optimal dan pada akhirnya menyebabkan masih tingginya angka kecelakaan kerja.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan konstruksi belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi meskipun peraturan mengenai K3 telah dibuat sejak tahun 1970. Pada tahun

2018, angka kecelakaan kerja di tempat kerja sebanyak 114.148 kasus dan tahun 2019 terdapat 77.295 kasus (Kemnaker, 2020).

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu:

1. UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2. Permen PU No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
3. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
4. Permen PU No. 09 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3
5. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum KEP. 174_MEN_1986 No. 104_KPTS_1986 Tentang K3 di Tempat Kegiatan Konstruksi
6. Permanekertrans No. 01 tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
7. UU No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
8. Permen PUPR No. 02 Tahun 2018

Menurut Andi, et.al (2016) penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi dapat diamati melalui enam variabel yaitu Komitmen top management, Peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, Komunikasi, Kompetensi pekerja, Keterlibatan pekerja, dan lingkungan kerja. Sedangkan menurut Gita dan Fery (2018) dalam penelitiannya, keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari beberapa variabel, yaitu Penerapan K3, Peraturan dan Prosedur K3, Komitmen manajemen terhadap K3, Lingkungan Kerja, Keterlibatan Pekerja, dan Evaluasi K3.

Pemahaman tentang pentingnya penerapan K3 pada pelaksanaan pekerjaan belum sepenuhnya dimengerti oleh para penyedia jasa konstruksi sehingga penerapan K3 tidak dilakukan sepenuhnya oleh penyedia jasa Konstruksi. Rendahnya pemahaman mengenai K3 mengakibatkan banyaknya kejadian kecelakaan kerja ketika pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penerapan sistem manajemen K3 pada pembangunan gedung belum maksimal karena masih terdapat kecelakaan kerja yang terjadi baik itu kecelakaan dalam skala besar maupun kecil. Akibat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan seringkali menjadi terlambat dari jadwal pelaksanaan selain itu juga mengakibatkan rentannya pekerja lain mengalami kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kinerja proyek menjadi tidak optimal.

Kinerja yang tidak optimal merupakan masalah yang sering dihadapi perusahaan dalam upaya meningkatkan laba. Masalah kinerja sangat erat

kaitannya dengan tercapainya tujuan perusahaan, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja proyek merupakan kendala yang dihadapi setiap perusahaan. Dikarenakan hal tersebut membuat penulis ingin melakukan penelitian terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengaruhnya terhadap kinerja proyek dengan mengambil studi kasus pada pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor – faktor penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja proyek di proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana peringkat (ranking) faktor-faktor penerapan program keselamatan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap kinerja proyek di proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah faktor-faktor penerapan keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi di proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk

1. Mengetahui Faktor – faktor penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja proyek di proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui peringkat (ranking) faktor-faktor penerapan program keselamatan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap kinerja proyek di proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan.
3. Mengetahui pengaruh faktor – faktor penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial terhadap kinerja proyek konstruksi di proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan tenaga kerja dapat menerapkan tindakan yang aman di tempat kerja sehingga pada akhirnya perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya.

2. Bagi Ilmuwan

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi ilmuwan agar bisa membuat evaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di pekerjaan konstruksi dan mengetahui kekurangan dan kelebihan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan pengaruh yang dihasilkan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terutama dalam faktor kualitas pekerjaan dan waktu pelaksanaan proyek.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah

1. Batasan penelitian untuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja didasarkan pada UU No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
2. Batasan penelitian untuk waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yaitu berdasarkan *time schedule* penawaran kontraktor.
3. Batas waktu penelitian yaitu selama bulan Oktober tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Proposal Tesis, meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi literatur-literatur yang mengandung teori yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dasar teori dari penelitian ini terutama dari segi ilmu keselamatan dan kesehatan kerja, teori yang berhubungan dengan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja serta teori-teori yang dapat mendukung penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode, peralatan, dan prosedur yang akan digunakan dalam analisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan penjelasan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta analisa mengenai hasil yang didapatkan dari penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis yang dilakukan, ditarik sejumlah kesimpulan yang menjawab tujuan dan permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian. Dalam bagian ini disampaikan pula sejumlah saran agar penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan